STATUS WARIS ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Devita Putri, Salma Rifda Salsabila, Malkah Melia Oktaviana, Aisyah Lashinta Dewi, Nur Rofiq

Hukum/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar.

devitap987@gmail.com , salmarifdasalsabila@gmail.com, malkahmeliao2@gmail.com
aisyahlashinta@gmail.com, nurrofiq@untidar.ac.id

Abstract

This research aims to determine the inheritance status of extra-marital children, whether extra-marital children get rights in terms of inheritance or not. The issue of inheritance distribution rights is a crucial issue, including the classification of heirs who can apply for their rights. The existence of problems regarding the status and position of extra-marital children as heirs can be reviewed through the provisions stipulated in the legislation. The use of descriptive qualitative methods in this research is reviewed from literature studies to describe and analyze the data obtained in depth regarding the inheritance status of children from invalid marriages. The results of this study indicate that the biological mother becomes the nasab of extra-marital child. In other words, extra-marital children do not have a nasab relationship with their biological father. The provisions regarding the amount that is the right of an extra-marital child are regulated in KHI. So, it can be concluded that there are special provisions regarding the status of inheritance rights for extra-marital children.

Keywords: *marriage, inheritance rights, lineage, adultery.*

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status waris dari anak luar kawin, apakah anak luar kawin mendapatkan hak dalam hal pewarisan atau tidak. Persoalan mengenai hak pembagian waris menjadi suatu masalah yang krusial termasuk pada penggolongan ahli waris yang dapat mengajukan haknya. Adanya persoalan mengenai status dan kedudukan bagi anak luar kawin sebagai ahli waris dapat ditinjau melalui ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Penggunaan Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini ditinjau dari studi kepustakaan untuk menguraikan dan menganalisa data yang diperoleh secara mendalam mengenai status waris anak dari perkawinan yang tidak sah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ibu biologis menjadi nasab dari anak luar kawin. Dengan kata lain, anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Ketentuan mengenai besaran yang menjadi hak dari anak luar kawin diatur dalam KHI. Sehingga Dapat disimpulkan bahwa terdapat ketentuan khusus mengenai status hak waris bagi anak luar kawin.

Kata kunci : *Perkawinan, Hak Waris, Nasab, Perzinaan.*

1. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk Allah SWT yang memiliki akal yang sempurna, pikiran dan juga perasaan dalam hatinya yang membedakan dengan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya. Demi kelangsungan hidupnya manusia harus dapat berinteraksi dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut ajaran hukum islam, Al-Qur'an berperan menggantikan, memperbaiki, dan bahkan melampaui agama-agama surgawi sebelumnya. Dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan yaitu Allah SWT dan juga mengenai manusia dengan manusia yang lain untuk saling menjaga keharmonisan rohani dan sosial. Dengan adanya hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya dapat memberikan dampak bagi kelangsungan hidup kedepannya dengan melalui perkawinan. Hukum terjalannya hubungan darah (keturunan) antar anggota lingkaran keturunan berdasarkan perkawinan, yang memberikan hak dan kewajiban terhadap mereka. Anak yang dilahirkan dari suatu proses perkawinan yang sah adalah keturunan yang sah. Oleh sebab itu, keabsahan perkawinan orang tua anak sangat menentukan status anak dan sifat hubungan hukumnya dengan mereka¹.

Perkawinan menjadi hak yang dimiliki oleh setiap manusia untuk melanjutkan kehidupan dan memiliki keturunan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perkawinan yang sah merupakan perkawinan dari seorang pria dan wanita yang dicatatkan dan diakui dalam negara, dengan syarat seorang perempuan tersebut tidak dalam keadaan hamil. Namun di Indonesia masih terjadi beberapa perkawinan yang tidak sah dikarenakan perempuan hamil diluar perkawinan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki manapun yang menimbulkan akibat adanya anak luar kawin yang tidak sah. Karena menjadi perbuatan yang tidak lazim dan tidak pantas serta merupakan aib bagi keluarga, maka topik mengenai bagaimana anak yang lahir dari luar kawin diperlakukan berdasarkan hukum keluarga merupakan topik yang sensitif. Namun untuk memberikan kepastian hukum, undang-undang harus mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini, karena anak di luar kawin memiliki dampak pada sistem hukum dan juga berdampak pada permasalahan sosial yang dapat memberikan dampak negatif terhadap masa depan anak.

Menurut konstitusi, setiap anak berhak menerima perlindungan yang diwajibkan oleh undang-undang, terhindar dari diskriminasi, dan negara wajib memperhatikan semuanya. Permasalahan sosial muncul karena anak haram dan anak sah mempunyai hak hukum yang berbeda.² Dalam hukum islam, perkawinan

¹ Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, D., *Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. AS-SYAMS, 2(1), (2021), hlm. 12-21.

² Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M., *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*. Justisi, 7(2), 2021, hlm.105-117.

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 dan 3 dimana perkawinan yaitu pernikahan yang menjalankan semua perintah Allah SWT dan menjadinya sebagai ibadah serta bertujuan untuk menciptakan hubungan keluarga yang dapat bahagia di dunia dan di akhirat serta mempunyai keturunan yang berakhlak *sholeh* dan *sholehah*. Di Indonesia, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur mengenai perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak mengatur mengenai waktu *iddah* ibu hamil tidak diatur secara khusus dalam peraturan ini. Lebih jauh lagi, meskipun perkawinan tersebut didahului oleh kehamilan di luar nikah, namun ketentuan dalam KHI tidak sedikitpun menghilangkan kedudukan pelaku sebagai pezina. Alasannya sederhana, yaitu perbuatan di masa lalu tidak dapat dibatalkan melalui pernikahan, dan keadaan hanya akan bertambah buruk jika ada kesulitan terkait status anak yang dikandungnya. Hukum juga berperan penting dalam memaksimalkan upaya perlindungan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan tersebut.³

Menurut KHI pada pasal 99 huruf (a) menyebutkan bahwa anak yang sah terjadi karena perkawinan antara orang tua yang sah dihadapan Allah SWT dan dari perempuan yang tidak hamil terlebih dahulu. Seorang pria dan seorang wanita yang telah melakukan hubungan badan diluar perkawinan itu termasuk zina menurut KHI, dan tidak dibedakan baik itu dari seorang yang masih gadis atau perjaka tetapi juga orang yang sebelumnya sudah memiliki perkawinan namun putus atau masih terikat perkawinan dengan orang lain. Pernikahan diluar perkawinan pastinya akan menimbulkan banyak kecaman dalam masyarakat dan mempertanyakan bagaimana nasib anak tersebut. Berdasarkan hukum Indonesia, pewarisan diatur dalam tiga (3) sistem utama: pewarisan Islam, pewarisan adat, dan pewarisan hukum positif. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat beberapa aturan berkaitan dengan masing-masing sistem tersebut. Perbedaan pokok ketiga sistem hukum ini antara lain berkaitan dengan susunan keluarga, konsep waris, pembagian ahli waris, bagian ahli waris, dan lembaga pengganti ahli waris. Warisan Islam yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai *faraidl*, yang artinya "bagian tertentu" merupakan salah satu faktor yang mengatur hubungan antar manusia. Seperti yang diungkapkan oleh A.Rofiq. Ketentuan mengenai ahli waris yang dapat mewaris harta dari pewaris, dan yang bukan dari bagian pewarisan serta bagian yang boleh diterimanya disebut dengan *faraidl* atau *faraidlah*.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) orang yang berhak dan yang paling utama dalam mendapatkan pewarisan adalah ahli waris yang sah dari pernikahan yang sah. Dibandingkan dengan ahli waris lainnya, mereka mempunyai tuntutan bagian yang lebih besar. Hal ini karena

³ Noviarni, D., *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam*, 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1), 2023.

eratnya hubungan dan hubungan darah ahli waris. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, setiap orang yang wafat tanpa ada ahli waris yang sah, dapat mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya yang diakui sebagai keturunannya. Setiap anak yang dilahirkan pasti akan memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hubungan mereka dengan orang tua akan terus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hubungan tersebut tidaknya hanya hubungan batin dengan orang tua saja tetapi juga hubungan hukum yang menyangkut dirinya dengan orang tua. Hubungan mereka dengan orang tua akan terus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hukum Islam memandang status anak yang dilahirkan dari hubungan diluar perkawinan dan implikasinya terhadap status tersebut dalam masyarakat?
2. Apakah anak yang lahir dari hubungan diluar perkawinan memiliki hak waris menurut hukum Islam, dan bagaimana mekanismenya?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui status anak yang dilahirkan dari hubungan luar perkawinan dan pandangannya di masyarakat
2. Untuk mengetahui hubungan hukum Islam dengan anak yang lahir dari hubungan diluar perkawinan dalam pewarisan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang ditinjau dari studi kepustakaan. Metode ini merupakan metode untuk menguraikan dan menganalisa data yang diperoleh dengan lebih mendalam mengenai status anak dari hubungan diluar perkawinan yang tinjau dalam hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam serta pandangannya dalam masyarakat. Penelitian ini juga membahas mengenai hubungan pewarisan bagi anak diluar perkawinan Metode penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pembahasan penelitian dan menganalisis data terkait tanpa mengubah arsip data tersebut. Metode kualitatif deskriptif yang ditinjau dari studi kepustakaan cukup relevan dengan penelitian ini, karena data yang diperoleh diungkapkan secara mendalam mengenai hubungan anak diluar perkawinan dan pewarisannya.

3. PEMBAHASAN

3.1 Hukum Islam memandang status anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan

Kehidupan setelah menikah tentunya tidak jauh dengan dambaan mempunyai seorang anak, karena kehadiran mereka memberi warna sendiri bagi kehidupannya. Seorang anak ialah pemberian dan anugerah dari sang Maha Kuasa yang selalu dinantikan. Hadirnya seorang anak sebagai bentuk kepercayaan dari Tuhan yang harus dilindungi dan dibimbing untuk sumber daya dia menapaki proses kehidupannya. Tentunya apapun yang diberikan di dunia akan

dipertanggung jawabkan di akhirat tak terkecuali amanah dititipkan seorang anak. Sejak anak lahir di dunia, maka otomatis hak-hak akan melekat pada dirinya yang didapat dari kedua orang tuanya. Hak-hak yang melekat meliputi nasab, susuan, pemeliharaan, kewalian, dan waris. Hak nasab adalah yang paling penting diantaranya yang lainnya, karena dari hak ini maka hak-hak anak lainnya dapat terpenuhi. Hak yang didapat dari ayah adalah mengenai kepastian nasab, sebagai hasil perkawinan dengan pasangannya. Nasab sendiri didapat karena adanya perkawinan, adanya pengakuan, dan karena pembuktian. Karena adanya perkawinan, penjelasannya perkawinan merupakan cara yang sah dan dibenarkan untuk dapat memiliki nasab. Syarat-syarat mengenai kehamilan harus terpenuhi yaitu anak lahir dalam masa tertentu.

Hukum dalam Islam menjelaskan batas minimal kehamilan yaitu selama 6 (enam) bulan yang dihitung dari masa penetapan perkawinan yang sah. Karena pengakuan, ahli fiqih berpendapat bahwa ada dua pengakuan yaitu pengakuan yang dibebankan pada orang lain yaitu pengakuan bahwa anak tersebut adalah masih memiliki hubungan saudara dengan orang yang mengaku. Pengakuan ini perlu bukti atau menetapkan ayahnya. Dan pengakuan yang dibebankan pada diri orang yang mengaku yaitu pengakuan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Pengakuan cukup memiliki syarat-syarat yang cukup yaitu seseorang yang mengaku adalah benar-benar ayahnya dengan adanya bukti yang konkrit bahwa dia merupakan ayah dari anak tersebut, nasab dari anak yang diakui tidak diketahui maksudnya nasab anak itu bukan berasal dari orang yang menjadi ayahnya pada saat itu karena nasab tidak dapat menerima *fasakh*, dan anak yang sudah diakui juga membenarkan pengakuan tersebut. Karena pembuktian yaitu diperbolehkannya penetapan nasab anak dengan cara pembuktian, yang disebabkan tidak dapat ditetapkannya nasab anak karena perkawinan dan pengakuan. Hak susuan, seorang anak yang dilahirkan di dunia mendapatkan hak perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan dari orang tuanya. Hak pemeliharaan itu salah satunya melalui hak penyusuan.

Seorang ibu memiliki kewajiban untuk memberikan penyusuan kepada anaknya dengan berbagai cara baik secara langsung atau melalui ibu susu sewaan. Hak pemeliharaan adalah berupa pemberian pendidikan dan seluruh keperluan anaknya. Jangka waktunya tidak diberikan batasan karena itu tergantung pada kemampuan dari kedua orang tua. Hak kewalian adalah hal yang meliputi pendidikan, pengawasan, dan perkawinan. Hak waris, waris diberikan oleh ahli waris. Ahli waris yaitu setiap orang yang masih memiliki nasab dengan si mati. Seorang anak telah diberi kasih sayang dan terpenuhi hak-haknya oleh kedua orang tua nya tentu di dalam diri anak tergerak untuk memberikan bakti kepada kedua orang tuanya. Bakti kepada kedua orang tua tersebut dengan berbuat baik seperti melayani kedua orang tuanya, berlemah lembut, menyayangi nya, selalu mengingat

jasa mereka sehingga senantiasa bersyukur, dan kepada orang tua selalu menghormati serta selalu mendoakannya. Selain itu ketika orang tua sudah renta maka anak wajib memelihara dan membiayai orang tuanya serta bisa menjaga kehormatan kedua orang tua.

Lahirnya anak karena proses perkawinan yang sah memiliki keuntungan dalam melaksanakan hak-hak yang diterima anak seperti penjelasan sebelumnya. Namun, ada keadaan dimana anak yang dilahirkan bukan disebabkan dari proses perkawinan yang sah. Fenomena lahirnya anak bukan dari proses perkawinan menjadi fenomena yang sering dibahas di Indonesia, banyak data dan temuan terkait hal tersebut. Data di internet menerangkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKBN) menyebut bahwa perkawinan dini mencapai angka 50 ribu dan hamil diluar nikah menjadi penyebab nya. Berikut data dari Komnas Perempuan yang bersumber dari Badan Peradilan Agama bahwa angka permohonan dispensasi kawin mulai meningkat drastis pada tahun 2020 yaitu mencapai 64 ribu, yang sebelumnya pada rentang tahun 2016 - 2019 hanya mencapai 8 ribu - 23 ribu permohonan. Tahun berikutnya yaitu 2021 mencapai 59 ribu sedangkan pada tahun 2022 mencapai 52 ribu. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak menjelaskan bahwa ribuan remaja hamil di luar kawin dan salah satu solusinya ialah dengan menikahkan mereka. Fenomena ini merupakan kehamilan tidak diinginkan (KTD). Di Indonesia angka KTD mencapai 40% yang dialami oleh perempuan berusia 15-49 tahun. Jadi, dari total kehamilan per tahun mencapai sekitar 4,8 juta. Data ini bersumber dari Guttmacher Institute,LSM. Separuh dari kasus KTD berakhir dengan aborsi. Walaupun tidak semua angka KTD disebabkan oleh kasus hamil di luar nikah.

Polemik ini merambah pada masalah hukum sebagai negara hukum Indonesia selalu membuat aturan agar memiliki kepastian hukum tak terkecuali mengenai permasalahan anak diluar kawin ini. Putusan MKi No. 46/PUU-VIII/2010 yang merupakan pengujian materil terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan khususnya pada perubahan dalam Pasal 43. Setelah putusan itu keluar, terdapat revisi dari Pasal 43 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada peraturan sebelumnya status anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya menjadi memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibunya. Dalam kasus ini pemohon telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2018 yaitu pernikahan sah secara agama. Namun, putusan itu menimbulkan penilaian positif dan negatif di masyarakat. Masyarakat yang menyetujui menilai putusan tersebut merupakan pembaharuan hukum yang signifikan bagi perlindungan anak. Namun, bagi masyarakat yang tidak mendukung menilai bahwa putusan itu dapat mengarah pada legalisasi terhadap perkawinan siri ataupun perbuatan zina.

Islam adalah agama yang dipercayai dan dianut oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia tentunya memiliki peran penting sebagai rujukan atas

masalah-masalah umum yang terjadi dalam masyarakat. Termasuk mengenai sudut pandang dari Islam terhadap lahirnya anak bukan dari pernikahan yang sah. Abdul Manan (2006) membagi pengertian anak luar nikah menjadi dua. Yang pertama, anak yang ada atau lahir karena hubungan badan antara lawan jenis namun keduanya atau satu diantaranya masih terjalin pada hubungan pernikahan dengan orang lain. Jadi, anak itu disebut juga anak zina, bukan anak luar kawin. Kedua, anak yang ada atau lahir karena hubungan badan lawan jenis dimana kedua pasangan itu masih lajang. Jadi, anak tersebut disebut juga anak luar kawin. Perbedaan dari penjelasan di atas adalah anak zina mendapatkan pengakuan dari pihak orang tua biologisnya di sisi lain anak luar kawin bisa mendapatkan pengakuan jika telah berlangsung pernikahan yang sah.

Status anak di luar perkawinan dijelaskan dalam Q.S. al-Ahzab ayat 5 disebutkan bahwa anak yang diperoleh dari luar kawin tidak bisa mempunyai nasab dari pihak ayah. Dalam ayat dari surat tersebut dipaparkan bahwa anak angkat tetaplah anak angkat tidak bisa diangkat menjadi anak kandung. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam *Tafsir Qur'an Al-Adzim* pemaknaan dari kalimat "*Wa ma Ja'ala Ad'iyaaikum Abnauku*" adalah bahwa pengangkatan anak angkat tidak akan mengubah status anak tersebut menjadi anak kandung sehingga tetap tidak mendapatkan nasab dari pihak ayah yang melakukan pengangkatan (Katsir, 2015). Dan dalam HR. Al-Bukhari dan Muslim dijelaskan nasab anak diperoleh dari laki-laki yang menikahi ibunya atau disebut ayah dan bagi pelaku zina akan dikenakan hukum yang berat. Pemberian nasab kepada seorang anak mungkin terlihat sepele namun, jika pemberian nasab tersebut tidak diperhatikan dengan seksama maka akan mengganggu arti nasab itu. Ditetapkannya nasab itu berarti pihak ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi, mendidik, dan menjadi wali nikah. Seperti penjelasan mengenai hak-hak yang didapat anak sah sebelumnya. Nasab adalah kenikmatan yang dikaruniakan Allah. Lahirnya anak diluar pernikahan yang sah itu memiliki beberapa akibat yang ditanggung anak itu yaitu :

- a. Nasab dari anak itu didapatkan hanya dari pihak ibu. Sehingga kewajiban ayah kepada anak itu gugur. Jadi, ikatan yang muncul atas dasar hubungan manusiawi, tidak secara hukum.
- b. Tidak menjadi ahli waris dari pihak ayahnya. Dengan nasab maka hak anak seperti menjadi ahli waris dapat terpenuhi namun, jika anak itu tidak memiliki hubungan nasab maka gugurlah hak anak itu untuk menjadi ahli waris dari pihak ayah.
- c. Ayah tersebut tidak diperbolehkan menjadi wali bagi anak yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak sah itu. Hal itu kembali lagi kepada hubungan nasab. (Syarifuddin,2002)

3.2 Hak waris bagi anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan menurut Hukum Islam

Pasal 830 KUHPerdara menjelaskan bahwa harta warisan terbuka karena adanya kematian, sehingga diketahui bahwa warisan tidak dapat dibagikan kepada ahli waris jika si pewaris masih hidup. Kemudian pada pasal 832 KUHPerdara menyebutkan mengenai siapa saja yang memiliki hak atas warisan. Hak waris merupakan suatu hak yang melekat pada diri si ahli waris, dimana hak tersebut tidak dapat diganggu gugat. Apabila hak tersebut tidak didapatkan oleh ahli waris, maka ahli waris dapat menuntut agar hak tersebut diberikan kepadanya. Terdapat 4 golongan yang termasuk ahli waris yaitu:

- a. Golongan pertama adalah pasangan hidup dan keturunannya, ketentuan ini di atur secara jelas pada pasal 852 BW
- b. Golongan kedua, orang tua atau saudara kandung pewaris.
- c. Golongan ketiga, kakek atau nenek atau keluarga dalam garis lurus keatas setelah orangtua pewaris dari masing-masing yang masih hidup.
- d. Golongan keempat, paman bibi atau saudara sepupu sedarah atau derajat keenam dihitung dari si pewaris.

Adanya pembagian golongan terhadap ahli waris ini ditujukan untuk mengetahui siapa ahli waris yang lebih berhak dan didahulukan menurut tingkatannya. Jika ahli waris pada golongan pertama masih hidup, maka golongan ke 2 ataupun golongan setelahnya tidak dapat menuntut harta warisan karena yang berhak atas warisan ialah ahli waris pada golongan pertama. Diketahui apabila suami istri telah meninggal, maka harta warisan tersebut jatuh ke tangan si anak yang merupakan keturunan dari suami istri tersebut, dimana keturunan tersebut secara jelas dan pasti memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tua biologisnya didasarkan atas perkawinan yang sah. Namun berdasarkan realita, tidak semua keturunan lahir dari perkawinan yang sah. Terdapat juga, keturunan yang lahir dari luar perkawinan yang sah atau disebut sebagai anak hasil dari perbuatan zina, sehingga ia hanya memiliki suatu hubungan ikatan atau keperdataan dengan sang ibu.

Dalam ketentuan hukum islam, anak yang lahir bukan dari rangkaian proses perkawinan yang sah yaitu lahir di luar perkawinan menjadikan anak tersebut tidak mendapat nasab dari sang ayah biologisnya, dalam artian bahwa si anak tidak ada hubungan atau pengakuan dari ayah walaupun perbuatan perzinahan tersebut dapat dibuktikan. Namun sebaliknya, apabila perbuatan perzinahan tersebut tidak dapat dibuktikan walaupun perbuatan zina tersebut memang dilakukan, maka anak tersebut dapat memiliki hubungan dengan ayah biologisnya⁴. Nasab ialah

⁴ Adawiyah, R., dkk., Inheritance Rights Of Outside Marriage Descendats After The Ruling Of The Constitutional Court Number 46 Of 2010, Iblam Law Review Vol.4 No. 1, 2024, hlm. 591.

kelegalitasan atau pengakuan suatu hubungan darah dalam keluarga yang nantinya berpengaruh pada hak-hak yang dimiliki oleh anak sebagai bukti dari adanya hubungan nasab dengan sang ayah⁵. Ada beberapa cara atau langkah yang dapat ditempuh untuk menentukan nasab seorang anak dengan orangtuanya menurut Wahbah Zuhaili, antara lain :

- a. Terdapat dua pandangan dasar mengenai nasab anak yaitu, jika terdapat hubungan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat dijadikan sebagai sebuah dasar bagi nasab si anak. Sedangkan pandangan menurut Abdul Azim bin Badawi Al Khalafi berpendapat bahwa suatu hubungan darah atau ikatan antara orangtua dan keturunannya harus diawali dengan adanya akad yang sah sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam.
- b. Dilihat dari pengakuan garis atau keturunan (*itsbat nasab bilang iqrar*) menurut Abdul Mannan yaitu, bilamana tidak dapat dibuktikan adanya hubungan dari suami istri yang tidak sah, maka anak di luar kawin tersebut tetap dapat diakui.
- c. Langkah selanjutnya dapat melalui *Mubaiyyinah* (perbandingan) yang didasarkan pada bukti sah bahwa anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan orangtuanya dan terdapat juga kemiripan antara si anak dengan orangtua.

Kedudukan dari anak diluar kawin yang termuat dalam Undang- Undang, KUHPerdara dan KHI tidak mengatur secara rinci mengenai kedudukan dari anak diluar kawin, namun dalam peraturan itu hanya memuat mengenai kedudukan anak, meliputi anak sah yang berasal dari suatu perkawinan sah, anak yang timbul karena adanya perbuatan zina dari kedua orang tuanya namun mendapat pengakuan atau biasa disebut sebagai anak dari luar perkawinan yang diakui, dan terakhir adalah anak yang lahir diluar suatu perkawinan sah yang tidak mendapat pengakuan atau biasa disebut sebagai anak luar perkawinan yang tidak diakui.

Memang tidak ada pengaturan secara pasti mengenai penyebutan anak haram ataupun anak zina. Dalam hukum islam, ketika terdapat laki-laki diketahui akan menikahi seorang wanita dalam kondisi wanita tersebut mengandung , dimana telah diketahui bahwa si anak yang berada dalam kandungan tersebut, bukan merupakan anak biologis dari calon laki-laki yang akan menikahi ibu dari anak tersebut dan dilangsungkan dalam suatu perkawinan darurat (*nikah tambelan*) memiliki perspektif berbeda antara pengadilan agama dan pengadilan umum terkait hak yang akan dimiliki oleh anak yang ada dalam kandungan tersebut. Menurut pandangan pengadilan agama (*Priesterraad*) menjelaskan bahwa status anak tersebut tidak memiliki hak mewaris, sedangkan menurut pandangan dari pengadilan umum (*Landraad*), hak mewaris dapat dimiliki oleh anak tersebut karena telah mendapat pengakuan⁶. Kemudian, ada pandangan lain dalam hukum

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*, hlm. 594.

Islam yang mengatakan bahwa kedudukan anak dapat dilihat melalui hubungan biologis yang melekat diantara keduanya. Dalam pandangan tersebut pernyataan bahwa anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak kandung, apabila dilahirkan dalam perkawinan sah yaitu perkawinan yang dianggap resmi menurut agama dan undang-undang, sementara itu jika si anak lahir dari perzinahan atau merupakan anak yang lahir diluar dari perkawinan sah atau resmi, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan dengan sang ibu. Ini berarti bahwa si anak tidak menjadi ahli waris dari si ayah. Ketentuan tersebut berlaku juga apabila si anak berjenis kelamin perempuan, ia tidak dapat menjadikan si ayah biologis sebagai wali nikahnya.

Pandangan lain muncul dari ulama Malikiyah yang menyebutkan bahwa akibat dari adanya anak yang dihasilkan diluar perkawinan terhadap hak waris bagi anak yang dikandung menyatakan bahwa anak tersebut tidak memiliki hak yang seharusnya dimiliki jika ia merupakan anak sah untuk mewaris harta peninggalan dari ayah biologisnya meskipun diakui atau tidaknya oleh si ayah sebagai anak kandung. Status anak diluar perkawinan disini memiliki persamaan kedudukan dengan anak mula'annah yaitu hak waris hanya dapat diperoleh dari garis keturunan ibu⁷ saja sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 100 KHI. Apabila ayah biologis meninggal dunia, anak hasil dari perzinahan atau anak diluar kawin tidak digolongkan sebagai ahli waris. Berbeda jika ibu dari anak yang lahir dari luar kawin, maka anak tersebut menjadi ahli waris atas harta benda milik si ibu⁸. Dalam KHI juga diatur mengenai besaran harta warisan yang dapat diterima oleh anak diluar kawin terhadap harta benda dari nasab ibu yaitu⁹:

- a. Jika ia merupakan anak tunggal dan berkelamin perempuan, maka mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari keseluruhan harta warisan.
- b. Jika memiliki anak lebih dari satu, maka menerima $\frac{2}{3}$ bagian.
- c. Apabila terdapat anak laki-laki, maka anak tersebut menjadi 'asabah. Ini menjadikan kedudukan anak diluar kawin tersebut memiliki besaran warisan yang sama seandainya ia merupakan anak sah dari orang tuanya, perbedaannya hanya terletak pada harta waris dari pihak ibu yang dapat diwariskan ke si anak laki-laki tersebut.

Berlandaskan pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa golongan yang berhak menerima waris dari orang yang telah wafat yaitu:¹⁰

1. Secara hubungan aliran darah

⁷Tamba, R., Siantar, RML, Sulvina, A., & Hadiningrum, S., *Hak Waris Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Fikih Islam, Teori Ekonomi dan Hukum Indonesia , 1 (3), (2023), hlm. 462.

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid.,

¹⁰ Gani, R. A., Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam). *Al-Risalah*, 11(01), 84-109, 2018, hlm.104.

- a. Kelompok laki-laki berupa bapak, seorang keturunan laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek
- b. Kelompok Perempuan berupa Ibu, seorang keturunan perempuan, dan nenek
2. Secara hubungan perkawinan

Dalam perspektif islam, menurut aspek penyebabnya ahli waris terdapat dua jenis yaitu ahli waris sabiyyah dan ahli waris nasabiyyah. Apabila antara orang yang satu dengan yang lainnya sebelumnya tidak ada ikatan darah bahkan bukan termasuk ahli waris kemudian menjadi ahli warisnya maka disebut dengan ahli waris sabiyyah. Misalnya pasangan suami istri sebelumnya tidak ada ikatan apapun dan tidak berhak menerima warisan satu sama lain namun setelah membina rumah tangga dan salah satunya meninggal dunia maka mereka berhak menerima warisan satu sama lain. Sedangkan ahli waris sabiyyah merupakan ahli waris yang diakibatkan karena adanya ikatan darah atau keturunan dengan orang yang mewariskan. Misalnya adalah anak berasal dari keturunan orang tuanya.

Anak yang terlahir dari suatu rangkaian proses perkawinan sah sesuai syariat agama tentu memperoleh nasab terhadap ayah kandungnya. Hal tersebut berbeda apabila hamilnya seorang wanita diakibatkan adanya perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, anak tersebut yang disebut anak di luar kawin maka tidak mendapatkan nasab dari ayah kandungnya dan keluarga ayah kandungnya. Meskipun anak di luar kawin namun sebagai manusia yang masih mempunyai relung hati dan perasaan yang sensitif tentu predikat sebutan anak di luar kawin yang melekat pada dirinya akan melukai hatinya padahal itu bukan kesalahan yang diperbuat. Majelis Ulama Indonesia menghadirkan jalan keluar permasalahan hak anak di luar kawin sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak di luar kawin. Dalam hal ini, MUI menyuarakan bahwa ayah kandung dari anak dapat tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anak di luar kawinnya berupa dana pendidikan dan kebutuhan sehari-hari kecuali perihal pembagian warisan.¹¹

Secara teori Kompilasi Hukum Islam bahwa anak hasil dari hubungan di luar perkawinan ditentukan oleh nasab ibunya. Berdasarkan hal tersebut, pada saat yang wafat merupakan bapak zinanya maka baik keturunan laki-laki maupun perempuan darinya tidak memiliki hak memperoleh warisan sedikitpun. Berbanding terbalik pada saat Ibu zinanya yang wafat maka baik keturunan laki-laki maupun perempuan darinya tetap berhak memperoleh warisan dan berstatus sebagai ahli waris. Berdasarkan hukum waris islam Apabila seorang anak di luar kawin wafat dan tidak memiliki baik pasangan maupun anak maka ibu atau keluarga dari pihak ibu yang merawatnya berhak menerima hartanya. Hal ini kembali kepada konsep awal karena anak tersebut dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah

¹¹ Pusvita, S., Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 31-51, 2018, hlm. 49.

kandungnya sendiri. Jadi ayah biologis atau keluarga dari pihak ayahnya tidak memiliki hak untuk menuntut pembagian warisan harta terhadap anak di luar kawin yang telah wafat. Kemudian pilihan terakhir jika ibu kandung dan keluarga dari pihak ibu tidak ada serta anak di luar kawin ini tidak memiliki siapapun maka hartanya akan diserahkan kepada baitul maal atau sebagai harta yang tidak ada kepemilikan.

Berdasarkan firman Allah SWT yang terkandung dalam ayat Al Qur'an telah tertulis mengenai ketentuan waris dalam agama islam. Seluruh aturan tentang pewarisan terhadap status anak di luar kawin telah tercantum secara eksplisit dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tentunya didasarkan pada isi al- Qur'an dan sabda Rasulullah S.A.W. Berkenaan dengan besar kecilnya harta warisan yang didapat oleh anak di luar kawin tergantung pada jumlah harta yang dimiliki Ibunya dan saudara kandungnya. Ketentuan mengenai prosedur pembagian harta waris dan jumlah yang didapatkan oleh anak sah berlaku sama terhadap anak di luar kawin. Sedangkan secara Perdata dasar-dasar ketentuan pada pewarisan terhadap anak di luar perkawinan tercantum pada beberapa isi pasal dalam KUHPperdata. Dalam KUHPperdata sendiri diatur mengenai legalitas anak yang berasal dari hubungan di luar perkawinan sampai pembagian warisannya.

Pada saat pembagian pewarisan seorang anak dilakukan berlandaskan Kompilasi Hukum Islam di mana ia tidak berhak mendapatkan harta sedikitpun, maka dapat diambil alternatif lainnya yaitu dengan cara pengalihan harta. Dalam hal ini bisa dilaksanakan melalui prosedur pembagian beberapa bagian harta atau sering disebut dengan hibah.¹² Di negara Indonesia aturan pemberian hibah telah diatur secara rinci dalam pasal 210-214 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki akal sehat dan telah berusia minimal 21 tahun dapat melakukan hibah dengan batas maksimal 1/3 dari jumlah harta benda yang dimilikinya kepada orang lain dengan sukarela tanpa adanya paksaan apapun didampingi oleh dua orang sebagai saksi. Perlu diperhatikan pemberian hibah wajib diberikan ketika bapak kandungnya belum meninggal dunia.

Solusi lainnya yang dapat dilakukan karena adanya larangan pembagian harta benda warisan kepada anak di luar kawin adalah dengan cara melalui wasiat. Ayah kandung diperbolehkan menulis wasiatnya sebelum meninggal dunia untuk memberikan hartanya kepada anak di luar kawin dengan syarat tidak boleh melebihi jumlah harta yang diwariskan kepada anak sahnya. Tentu saja dalam Islam bukan berarti seorang Ayah diharamkan memberikan hartanya kepada anak hasil di luar perkawinan. Bagaimanapun seorang anak tidak bisa memilih dilahirkan dalam

¹² Mutriadi, A., Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2), 284-291, 2022, hlm. 288.

keadaan tertentu dan tidak dapat memilih orang tua mereka. Selain itu, bagaimanapun keadaannya ayah biologis tetap memiliki ikatan batin secara lahiriah dengan anaknya termasuk anak di luar perkawinan.

4. KESIMPULAN

Persoalan mengenai pembagian waris menjadi sangat krusial, hal tersebut juga dialami oleh anak yang lahir dari luar perkawinan, sehingga terdapat perbedaan dari segi kedudukan dan hak waris antara anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah atau disebut sebagai anak sah dengan anak yang lahir di luar kawin atau disebut anak yang lahir dari perbuatan zina. Dalam hal ini, anak di luar kawin tidak mendapatkan porsi yang sama dengan anak sah terkait pembagian hak waris. Kedudukan anak diluar kawin dapat dikategorikan sebagai ahli waris jika dilihat dari garis keturunan ibu biologisnya. Dengan begitu, ia tidak bisa menjadi ahli waris harta kekayaan dari pihak ayah. Ini disebabkan karena anak diluar kawin dianggap tidak memiliki nasab dengan si ayah walaupun merupakan anak biologisnya. Ketentuan mengenai besaran waris yang diterima oleh anak diluar kawin telah diatur dalam undang-undang baik KUHPerduta maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, terdapat cara pembagian harta dari ayah biologis kepada anak di luar kawin tanpa melalui proses pewarisan yaitu melalui hibah dan wasiat. Ketentuan mengenai besar kecilnya dan prosedur pemberian hibah serta wasiat kepada orang lain telah diatur secara eksplisit dalam KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. P. (2024). HAK WARISAN KETURUNAN PERNIKAHAN LUAR SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46 TAHUN 2010. *. TINJAUAN HUKUM IBLAM*, 4 (1), 585-600.
- Aqilan Ananda Purwanti. (2023, Juli 18). "*BKBN Sebut 50 Ribu Anak Hamil Di Luar Nikah Karena Faktor Pendidikan*". Retrieved April 27, 2024, from <https://www.pramborsfm.com/news/bkbn-sebut-50-ribu-anak-hamil-di-luar-nikah-karena-faktor-pendidikan>.
- Dunggio, A. H. (2021). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *AS-SYAMS*, 2(1, hlm. 12-21.
- Fatah, R. (n.d.). *Bab III Tinjauan Umum Tentang Anak dan Orang Tua*. Retrieved 2024, from <https://repository.radenfatah.ac.id/7827/3/skripsi%20BAB%20III.pdf> repository:
- Gani, R. A. (2018). Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Risalah*, 11(01),, 84-109.

- Ginsu, D. S. (2022). Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010. *ournal of Gender and Children Studies, Vol.2, No. 1*, hlm 8-11.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
Kompilasi Hukum Islam
- Mutriadi, A. (2022). Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2), 284-291.
- Noviarni, D. (2023). Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1).
- Plus, K. (2023, Juli 24). *Naik Drastis Remaja Hamil di Luar Nikah*. Retrieved April 27, 2024, from Kumparan: <https://kumparan.com/kumparannews/naik-drastis-remaja-hamil-di-luar-nikah-20r0gOfYMuG>
- Qosim, S. (2022). Status Anak Di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam. *ISSN 2338 4638, Vol. 6, No. 3*, Hlm. 56-60.
- Susanto, M. H. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *Justisi*, 7(2),, hlm.105-117.
- Tamba, R. S. (2023). Hak Waris Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Fikih Islam, Teori Ekonomi dan Hukum Indonesia* , 1 (3), 459-464.